



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Agustus 2020/Khusus - Calon PN)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KPUD (CALON KEPALA DAERAH)
UNIT KERJA : PEMERINTAH KOTA BLITAR
SUB UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TJUTJUK SUNARIO
2. Jabatan : CALON WAKIL WALIKOTA
3. NHK : 411429

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 35.000.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/300 m2 di KOTA SURABAYA, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/300 m2 di KOTA SURABAYA, HASIL SENDIRI Rp. 4.600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 320 m2/120 m2 di KOTA SURABAYA, HASIL SENDIRI Rp. 3.700.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/120 m2 di SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m2/130 m2 di SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 276 m2/198 m2 di SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 855.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 67.000.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ---**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	9.799.396.857
F. HARTA LAINNYA	Rp.	1.620.000.000
Sub Total	Rp.	47.341.396.857
III. HUTANG	Rp.	1.120.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	46.221.396.857

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **2 September 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.